

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak, dapat disimpulkan bahwa lembaga ini memiliki kontribusi yang sangat penting dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak di wilayahnya. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) secara aktif melaksanakan berbagai program pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak, seperti penyuluhan ke sekolah-sekolah, edukasi kepada orang tua, pendampingan psikologis dan hukum bagi korban, serta penyediaan layanan pengaduan masyarakat. Selain itu, DPPPA juga menunjukkan kepekaan sosial dengan memberikan bantuan transportasi atau dukungan lainnya kepada korban dari keluarga prasejahtera yang mengalami kendala ekonomi. Semua bentuk intervensi ini merupakan wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan terhadap kelompok rentan, khususnya anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Pelaksanaan program-program tersebut memperlihatkan upaya maksimal dari DPPPA dalam menciptakan lingkungan yang aman, responsif, dan mendukung tumbuh kembang anak secara sehat dan bermartabat.

Meskipun demikian, pelaksanaan program perlindungan anak oleh DPPPA Kota Bekasi masih menghadapi sejumlah kendala yang cukup kompleks. Beberapa

hambatan yang muncul di lapangan antara lain adalah ketidakjelasan alamat pelapor atau korban yang menghambat proses komunikasi formal dan verifikasi lapangan, sikap tertutup dari anak korban saat proses konseling awal yang menyulitkan penggalian informasi, serta kurangnya partisipasi aktif dari pihak sekolah dalam menangani kasus bullying atau kekerasan lainnya yang terjadi di lingkungan pendidikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan baik secara teknis maupun struktural yang perlu segera diatasi agar program perlindungan anak dapat berjalan lebih efektif. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam sistem pendataan masyarakat, penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas SDM di lingkungan DPPPA, serta pendekatan yang lebih fleksibel dan berkelanjutan dalam penanganan kasus di lapangan. Keseluruhan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun DPPPA Kota Bekasi telah menjalankan peran strategisnya dengan baik, upaya untuk menciptakan sistem perlindungan anak yang optimal masih membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, dan instansi pemerintahan lainnya.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, agar dapat terelisasikan dengan baik ada beberapa rekomendasi yang akan penulis sampaikan kepada pihak yang berkaitan Adapun rekomendasi yang diberikan berbagi menjadi dua yakni, pertama rekomendasi yang bersifat akademik dan rekomendasi yang bersifat praktis, sebagai berikut:

5.2.1 Rekomendasi Akademik

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Bekasi, penulis memberikan beberapa rekomendasi akademik sebagai berikut:

1. Untuk Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi awal bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji isu-isu terkait kebijakan publik, perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, atau peran pemerintah daerah. Peneliti berikutnya dapat memperluas ruang lingkup kajian, misalnya dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, membandingkan antar daerah, menganalisis efektivitas program secara lebih mendalam atau menganalisis indeks kepuasan masyarakat.

2. Untuk Mahasiswa di Lingkungan Kampus

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber literatur dan bahan pembelajaran bagi mahasiswa, khususnya yang mengambil studi ilmu pemerintahan, kebijakan publik, sosiologi, atau studi gender. Kajian ini dapat dijadikan contoh penelitian lapangan yang menggambarkan peran lembaga pemerintah dalam menangani isu sosial.

3. Pengembangan Kajian Teoritis dan Praktis

Penelitian ini juga membuka peluang untuk mengembangkan kajian teoritis mengenai pemberdayaan dan perlindungan sosial, serta keterkaitannya dengan teori-teori administrasi publik, good governance, dan partisipasi masyarakat. Hal ini dapat menjadi dasar bagi mahasiswa untuk mengembangkan skripsi dengan pendekatan multidisipliner.

4. Sumbangan Terhadap Pengembangan Kurikulum

Temuan dan analisis dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pengayaan dalam mata kuliah yang relevan, seperti Kebijakan Publik, Administrasi Pemerintahan Daerah, atau Studi Gender dan Anak, guna memperkaya pemahaman praktis mahasiswa terhadap isu-isu sosial kontemporer.

5.2.2 Rekomendasi Praktis

Sebagai rekomendasi praktis, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi diharapkan dapat memperkuat kolaborasi lintas sektor dengan instansi terkait, meningkatkan pelatihan dan kapasitas sumber daya manusia, serta mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam layanan pengaduan dan pendataan kasus. Selain itu, perlu dilakukan pendekatan yang lebih proaktif kepada masyarakat melalui edukasi dan kampanye yang berkelanjutan agar kesadaran terhadap isu kekerasan dan pemberdayaan perempuan serta anak dapat terus meningkat di tingkat lokal. Terdapat beberapa saran yang dapat diajukan guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan program perlindungan anak ke depannya, antara lain :

1. DPPPA diharapkan dapat memperkuat sistem pendataan masyarakat, terutama dalam hal kelengkapan data identitas dan alamat pelapor maupun korban. Sistem informasi yang akurat dan terintegrasi dengan dinas terkait seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) atau RT/RW setempat sangat diperlukan untuk mendukung kelancaran komunikasi administratif dan pelaksanaan survei lapangan.

2. DPPPA perlu meningkatkan kapasitas dan kompetensi petugas lapangan maupun tenaga konselor yang menangani kasus kekerasan terhadap anak, khususnya dalam menghadapi korban yang mengalami trauma berat. Pelatihan psikologis dan teknik pendekatan yang lebih empatik perlu diberikan secara berkala agar proses konseling dapat berjalan lebih efektif dan mampu membuka komunikasi yang sehat antara korban dan petugas.
3. Kerja sama lintas sektor antara DPPPA dengan institusi pendidikan, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat, dan sektor swasta harus diperkuat. Sekolah sebagai institusi yang paling dekat dengan anak-anak perlu diberikan pelatihan khusus mengenai penanganan bullying dan kekerasan seksual, serta didorong untuk bersikap kooperatif ketika menerima aduan.
4. Penggunaan teknologi informasi perlu dimaksimalkan dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak, misalnya dengan menyediakan layanan pengaduan berbasis aplikasi atau website yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat luas. Teknologi dapat membantu menjangkau korban yang enggan atau tidak mampu melapor secara langsung ke kantor dinas.
5. DPPPA diharapkan terus melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program yang telah berjalan. Evaluasi ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi hambatan aktual di lapangan, menyesuaikan strategi intervensi, serta meningkatkan kualitas layanan perlindungan anak yang berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat.

Dengan implementasi saran-saran tersebut, diharapkan DPPP Kota Bekasi dapat semakin optimal dalam menjalankan fungsinya sebagai pelindung dan pendamping anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan, khususnya kekerasan seksual. Keberhasilan program perlindungan anak tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi dan lembaga pelaksana, tetapi juga pada responsivitas dan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh elemen yang peduli terhadap tumbuh kembang anak.